LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

PERIODE TAHUNAN 2025

AUDITED

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS

JL. GUNUNG SINGGALANG NO.14, BANCARKEMBAR, PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS
JAWA TENGAH, 53121, - Tlp. (0281) 631222, Fax. (0281) 631000, Email (lokapombms@gmail.com)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai POM di Banyumas adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan T.A 2025 *Audited* Balai POM di Banyumas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai POM di Banyumas. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyumas, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Banyumas

Gidion, S.Si., M.Sc
NIP. 198107172006041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Pernyataan Tanggungjawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I. Laporan Realisasi Anggaran 9

II. Neraca 9

III. Laporan Operasional 10

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 10

V. Catatan atas Laporan Keuangan 10

A. Penjelasan Umum 12

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Basis Akuntansi

A.4. Dasar Pengukuran

A.5. Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....27

B.1. Pendapatan

B.2. Belanja

B.2.1. Belanja Pegawai

B.2.2. Belanja Barang

B.2.3. Belanja Modal

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 37
C.1. Aset Lancar 37
C.1.1. Persediaan 38
C.2. Aset Tetap 38
C.2.1. Tanah 38
C.2.2. Peralatan dan Mesin 39
C.2.3. Aset Tetap Lainnya 40
C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 41
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
C.3. Aset Lainnya
C.3.1. Aset Tak Berwujud 41
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 42
C.4. Kewajiban Jangka Pendek
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga 42
C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan 42
C.4.3. Pendapatan Diterima Dimuka 44
C.4.4. Uang Muka dari KPPN 44
C.5. Ekuitas 44

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 45
D.2. Beban Pegawai 45
D.3. Beban Persediaan 47
D.4. Beban Barang dan Jasa 47
D.5. Beban Pemeliharaan 49
D.6. Beban Perjalanan Dinas 49
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 50

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas ……52
E.1. Ekuitas Awal ……52
E.2. Surplus (Defisit LO) ……52
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas ……52
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset ……52
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan ……52
E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap ……53
E.3.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ……53
E.3.5. Koreksi Lain-Lain ……53
E.4. Transaksi Antar Entitas ……53
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain ……53
E.4.2. Diterima Dari Entitas Lain ……54
E.4.3. Transfer Keluar ……54
E.4.4 Transfer Masuk ……

F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya ……

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

F.2.2. Rekening Pemerintah

F.2.3. Pengelola Keuangan

F.2.4. Hasil Inventarisasi Aset

F.2.5. Transaksi Resiprokal

F.2.6. Perjanjian Sewa atas Gedung/Bangunan dan Kendaraan

F.2.7. Program Prioritas Nasional

F.2.8. Capaian Ouput Stategis

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Kualitas Piutang 9

Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat 13

Tabel 3 Aset Lainnya 15

Tabel 4 Perincian Perubahan DIPA TA 2025 18

Tabel 5 Perincian Estimasi dan realisasi pendapatan TA 2025.....19

Tabel 6 Perincian Realisasi Pendapatan 20

Tabel 7 Perincian Realisasi Belanja 21

Tabel 8 Perincian Perbandingan Realisasi Belanja 22

Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai 23

Tabel 10 Perincian Pengembalian Belanja Pegawai 24

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang 24

Tabel 12 Realisasi Belanja Modal 25

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 26

Tabel 14 Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26

Tabel 15 Perincian Mutasi Persediaan 27

Tabel 16 Perincian Persediaan 28

Tabel 17 Mutasi Nilai Tanah Per 31 Desember 2025 29

Tabel 18 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.....29

Tabel 19 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 30

Tabel 20 Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31

Tabel 21 Perincian Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025.....33

Tabel 22 Perincian Beban Pegawai 36

Tabel 23 Perincian Beban Persediaan 37

Tabel 24 Perincian Beban dan Jasa 38

Tabel 25 Perincian Beban Pemeliharaan 39

Tabel 26 Perincian Beban Perjalanan Dinas 40

Tabel 27 Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 40

Tabel 28 Perincian Kegiatan Non Operasional 41

Tabel 29 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas ……43
Tabel 30 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas ……43

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai POM di Banyumas yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode TA 2025 *Unaudited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyumas, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Banyumas

Gidion, S.Si., M.Sc
NIP. 198107172006041001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Periode TA 2025 *Unaudited* Balai POM di Kabupaten Banyumas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.876.200,00 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.885.965.189,00 atau mencapai 46,74 % dari alokasi anggaran sebesar Rp8.313.169.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.168.747.053,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp46.394.784,00 ; Aset Tetap (netto) sebesar Rp11.168.747.053,00 ; Aset Lainnya sebesar Rp17.330.775,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp46.579.329,00 dan Rp11.122.167.724,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO dan beban. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 Sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.128.137.270,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.128.137.270,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Dari Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.303.840,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.126.833.430,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp11.362.151.824,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp4.126.833.430,00 ditambah koreksi-koreksi senilai Rp69.031,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.886.918.361,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp11.122.167.724,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI POM DI BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DIBAWAH)		REALISASI
PENDAPATAN	**B.1**					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,00	1.876.200,00	0,00	-	2.555.555,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**1.876.200,00**	**0,00**	**-**	
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	2.103.766.000,00	2.099.093.742,00	4.672.258,00	99,78	3.465.036.070,00
Belanja Barang	B.4	2.503.303.000,00	1.784.351.447,00	718.951.553,00	71,28	2.317.868.688,00
Belanja Modal	B.5	3.706.100.000,00	2.520.000,00	3.703.580.000,00	0,07	766.717.000,00
Jumlah Belanja		**8.313.169.000,00**	**3.885.965.189,00**	**4.427.203.811,00**	**46,74**	**6.549.621.758,00**

Banyumas, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Banyumas

Gidion, S.Si., M.Sc
NIP. 198107172006041001

II. NERACA

BALAI POM DI BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TA 2025	TA 2024
ASET LANCAR		C.1		
	Persediaan	C.1.1	46.394.784,00	46.131.985,00
	JUMLAH ASET LANCAR		**46.394.784,00**	**46.131.985,00**
ASET TETAP		C.2		
	Tanah	C.2.1	10.424.038.000,00	10.424.038.000,00
	Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.760.320.125,00	1.733.734.395,00
	Aset Tetap Lainnya	C.2.3	7.820.000,00	2.600.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lair	C.2.4	(1.087.156.631,00)	(841.482.364,00)
	JUMLAH ASET TETAP		**11.105.021.494,00**	**11.318.890.031,00**
ASET LAINNYA		C.3		
	Dana yang dibatasi penggunaannya	C.3.1	17.330.775,00	12.172.552,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		**17.330.775,00**	**12.172.552,00**
	JUMLAH ASET		**11.168.747.053,00**	**11.377.194.568,00**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		C.3		
	Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	46.579.329,00	15.042.744,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**46.579.329,00**	**15.042.744,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN		**46.579.329,00**	**15.042.744,00**
EKUITAS		C.4		
	Ekuitas	C.4.1	11.122.167.724,00	11.362.151.824,00
	JUMLAH EKUITAS		11.122.167.724,00	11.362.151.824,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			**11.168.747.053,00**	**11.377.194.568,00**

Banyumas, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Banyumas

Gidion, S.Si., M.Sc
NIP. 198107172006041001

Catatan :

1. LK Semester I : Judul : Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, Pada Tabel : 30 Juni 20..
2. Triwulan III Judul : Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, Pada Tabel : 30 September 20..
   Pada Tabel : 31 Desember 20..
3. LK Tahunan : Judul : per 31 Desember 2025 dan 2024
   Pada Tabel : TA 20..
4. Data pada face disesuaikan dengan Monsakti terakhir dan penomoran pada kolom Catatan disesuaikan dengan CaLK Neraca

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI POM DI BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	*D.1*	0,00	431.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**431.000,00**
BEBAN			
Beban Pegawai	*D.2*	2.125.800.418,00	3.456.268.070,00
Beban Persediaan	*D.3*	72.868.181,00	90.058.006,00
Beban Barang dan Jasa	*D.4*	993.989.645,00	1.137.376.490,00
Beban Pemeliharaan	*D.5*	49.124.379,00	31.358.980,00
Beban Perjalanan Dinas	*D.6*	667.537.751,00	1.064.997.349,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	*D.7*	218.816.896,00	189.114.828,00
JUMLAH BEBAN		4.128.137.270,00	5.969.173.723,00
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(4.128.137.270,00)**	**(5.968.742.723,00)**
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset		**212.640,00**	**793.000,00**
Pendapatan dari kegiatan non operasional	*D.8*	785.000,00	793.000,00
Beban Pelepasan Aset	*D.9*	572.360,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**1.091.200,00**	**0,00**
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.091.200,00	0,00
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**1.303.840,00**	**793.000,00**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	*D.10*	**(4.126.833.430,00)**	**(5.967.949.723,00)**
POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO	*D.11*	**(4.126.833.430,00)**	**(567.949.723,00)**

Banyumas, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Banyumas

Gidion, S.Si., M.Sc
NIP. 198107172006041001

Catatan :

1. LK Semester I : Judul : Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 20.. dan 20.. , Pada Tabel : 30 Juni 20..
2. Triwulan III Judul : Untuk periode yang berakhir pada 30 September 20.. dan 20..Pada Tabel : 30 September 20..
3. LK Tahunan Judul : Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20.. dan 20.., Pada Tabel : TA 20..
4. Data pada face disesuaikan dengan Monsakti terakhir dan penomoran pada kolom Catatan disesuaikan dengan CaLK LO

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI POM DI BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2025
EKUITAS AWAL	**E.1**	**11.362.151.824,00**	**10.767.574.245,00**
SURPLUS/DEFISIT LO	**E.2**	**(4.126.833.430,00)**	**(5.967.949.723,00)**
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	**E.3**	**(69.031,00)**	**0,00**
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	230.000,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	(299.031,00)	0,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**E.4**	**3.886.918.361,00**	**6.562.527.302,00**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(239.984.100,00)**	**594.577.579,00**
EKUITAS AKHIR	**E.5**	**11.122.167.724,00**	**11.362.151.824,00**

Banyumas, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Banyumas

Gidion, S.Si., M.Sc
NIP. 198107172006041001

Catatan :
1. LK Semester I : Judul : Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 20.. dan 20.. , Pada Tabel : 30 Juni 20..
2. Triwulan III Judul : Untuk periode yang berakhir pada 30 September 20.. dan 20..Pada Tabel : 30 September 20..
3. LK Tahunan Judul : Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20.. dan 20.., Pada Tabel : TA 20..
4. Data pada face disesuaikan dengan Monsakti terakhir dan penomoran pada kolom Catatan disesuaikan dengan CaLK LPE

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

PERIODE TAHUNAN 2025

AUDITED

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS

JL. GUNUNG SINGGALANG NO.14, BANCARKEMBAR, PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS
JAWA TENGAH, 53121, - Tlp. (0281) 631222, Fax. (0281) 631000, Email (lokapombms@gmail.com)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Profil dan kebijakan teknis Balai POM di Banyumas

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai POM di Banyumas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
b. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

	b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian; d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan; e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan; i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1. Kepala;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN BALAI POM DI BANYUMAS

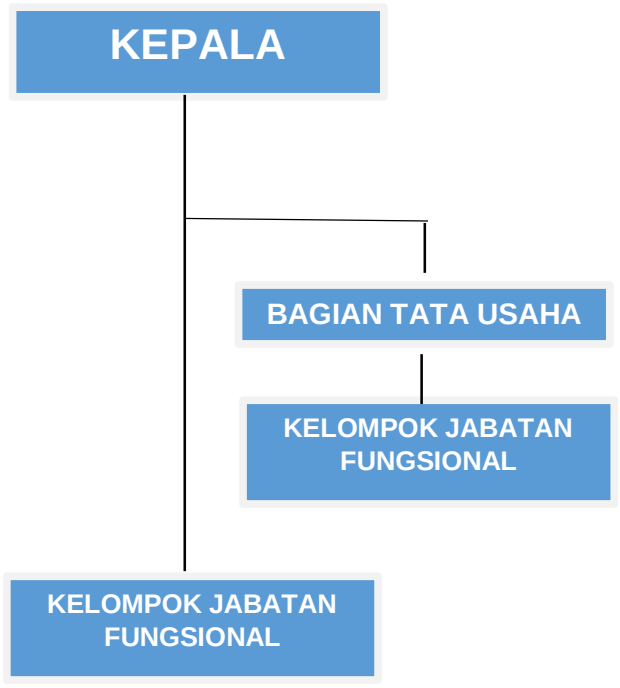

Dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Satker Balai POM di Banyumas berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung untuk Renstra 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Misi Balai POM di Banyumas sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan 15 anjan yang prima di bidang Obat dan Makanan

Pendekatan Penyusnan Laporan Keuangan

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Periode Tahunan *Audited* T.A. 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai POM di Banyumas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai POM di Banyumas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai POM di Banyumas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Tahunan *Audited* T.A. 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM..

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini

	adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BBPOM di Banyumas adalah sebagai berikut:
Pendapatan – LRA	**Pendapatan – LRA** - Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). - Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). - Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan – LO	**Pendapatan – LO** - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Besar POM di Balai POM di Banyumas adalah sebagai berikut: - Pendapatan Penjualan aset BMN
Belanja	**Belanja** - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN). - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban	**Beban** - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset	**Aset** Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
Aset lancar	**A. Aset Lancar** Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. • Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1.

Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan – Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/ DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. •

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
   a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (*leaflet*, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
   b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas *(Glassware)* dan;
   c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam

	proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding. 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan. 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Sesuai dengan keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tatanan yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial. • Persediaan disajikan sebesar : 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi: - Harga pembelian - Biaya pengangkutan - Biaya penanganan - Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

	2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: a. Potongan harga b. Rabat dan lainnya yang serupa. c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang diaBalaisikan dengan secara sistematis. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM. • Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi: a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya: i. Alat gelas yang masih ada di laboratorium. ii. Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan. iii. Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. Dan masih dalam keadaan baik. b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya: i. Alat gelas yang masih ada di laboratorium. ii. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
Aset tetap	**B. Aset Tetap** • Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan oleh masyarakat umum. • Nilai tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. • Pengakuan tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:

	a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); b. Pengeluaran untuk belanja aset dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah]; c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. • Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78. • Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Penyusutan Aset Tetap	**C. Penyusutan Aset Tetap** • Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. • Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a.Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau belanja yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengaBalaisikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

D. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya	**E. Aset Lainnya** • Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset persediaan, aset tetap, dan piutang jangka yang Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunannya. • Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk kekayaan intelektual. • Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. • Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. • Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 3.

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**Kelompok Aset Tetap**	**Masa Manfaat**
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

	a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka aset jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.
Ekuitas	**(7) Ekuitas** Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran	**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN** Balai POM Kab. Banyumas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp8.313.169.000,00. Selama periode berjalan, Balai POM Kab. Banyumas telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 dari DIPA awal dan tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran Balai POM Kab. Banyumas. a. Revisi DIPA 1 : B-PR.05.03.14C.02.25.101 Tgl 20 Februari 2025 Penghematan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 Tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 b. Revisi DIPA 2 : B-PR.05.04.24B.03.25.145 Tgl 25 Maret 2025 Pemutakhiran POK c. Revisi DIPA 3 : B-PR.05.04.24B.03.25.147 Tgl 26 Maret 2025 Relaksasi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 Tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 d. Revisi DIPA 4 : B-PR.05.03.24B.04.25.165 Tgl 22 April 2025 Pemutakhiran Halaman III DIPA e. Revisi DIPA 5 : B-PR.05.04.24B.06.25.145 Tgl 30 Juni 2025 Pemutakhiran POK f. Revisi DIPA 6 : T-KU.02.03.24B.07.25.294 Tgl 1 Juli 2025 Usulan Revisi Anggaran Dalm Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai *Existing* dan Anggaran CASN TA 2025 g. Revisi DIPA 7: PR.05.04.24B.09.25.24 Tgl 25 September 2025 Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan h. Revisi DIPA 8 : B-PR.05.03.24B.10.25.25 Tgl 14 Oktober 2025 Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK i. Revisi DIPA 9 : B-PR.05.03.24B.10.25.25 Tgl 5 November 2025 Revisi Anggaran berkaitan dengan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya terhadap usulan relaksasi (buka blokir) pemanfaatan efisiensi anggaran TA 2025 j. Revisi DIPA 10 : B-PR.05.03.24B.11.25.529 Tgl 13 November 2025 Pergeseran/Perubahan hal anggaran pagu tetap k. Revisi DIPA 11 : T-PR.05.03.24B.12.25.614 Tgl 12 Desember 2025 Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA TA 2025
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

Uraian		TA 2025		Perubahan
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Jasa	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	1.829.352.000,00	2.103.766.000,00	274.414.000,00
2.	Belanja Barang	2.500.638.000,00	2.503.303.000,00	2.665.000,00
3.	Belanja Modal	3.703.580.000,00	3.706.100.000,00	2.520.000,00
Jumlah Belanja		**8.033.570.000,00**	**8.313.169.000,00**	**279.599.000,00**

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp274.414.000,00 karena adanya penambahan pegawai di Balai POM di Banyumas.
2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp2.665.000,00 karena adanya penambahan biaya operasional kantor.
3. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp2.520.000,00 karena untuk memnuhi kebutuhan pengadaan Prasasti dalam rangka peresmian peningkatan status unit kerja dari Loka menjadi Balai.

Realisasi Pendapatan Rp1.876.200,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.876.200,00 atau mencapai 0% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00

Tabel 5.
Perincian Estimasi dan realisasi pendapatan TA 2025
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

No	URAIAN	Estimasi	Realisasi 31 Desember 2025	Persentase Realisasi
1	**Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**	0,00	785.000	-
2	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	0,00	1.091.200	-
	Pengembalian	-	0,00	-
	Jumlah	**-**	**1.876.200**	-

Realisasi Pendapatan Balai Besar POM di Banyumas yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 % dibandingkan dengan realisasi pendapatan untuk peroiode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Pengembalian sisa tunjangan struktual senilai Rp740.000,00 sesuai No. NTPN 2EF41488VVNNMMU8M Tgl 8 Januari 2025
- Pengembalian sisa uang makan bulan Desember 2024 senilai Rp351.200,00 sesuai No. NTPN1E9793CIFT5A9TMT Tgl 8 Januari 2025
- Lelang Peralatan dam Mesin kondisi rusak berat, dengan nilai total sejumlah Rp785.000,00 berdasarkan risalah lelang No : 218/09.06/2025-01 Tanggal 25 September 2025 dengan No NTB : 031842017653 dan No NTPN : A7ACD48VV0G5J9NG.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Balai POM di Banyumas sebagai berikut:

`

Tabel 6
Perincian realisasai Pendapatan
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

MAK	URAIAN	TA 2025	TA 2024	Persentase Realisasi
425999	**Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**	785.000,00	-	N/A
425911	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	1.091.200,00	-	N/A
425999	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	-	431.000,00	N/A
	Jumlah	**1.876.200,00**	**431.000,00**	-

Realisasi pendapatan pada Satuan Kerja Balai POM di Banyumas per Realisasi 31 Desember 2025 senilai Rp1.876.200,00.

Pendapatan Balai POM di Kab Banyumas berasal dari Pendapatan Lain-lain dan Pendapatan Hasil Penjualan lelang. Rincian estimasi dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- Pengembalian sisa tunjangan struktual senilai Rp740.000,00 sesuai No. NTPN 2EF41488VVNNMMU8M Tgl 8 Januari 2025
- Pengembalian sisa uang makan bulan Desember 2024 senilai Rp351.200,00 sesuai No. NTPN1E9793CIFT5A9TMT Tgl 8 Januari 2025
- Lelang Peralatan dam Mesin kondisi rusak berat, dengan nilai total sejumlah Rp785.000,00 berdasarkan rialah lelang No : 218/09.06/2025-01 Tanggal 25 September 2025 dengan No NTB : 031842017653 dan No NTPN : A7ACD48VV0G5J9NG.

Realisasi Belanja Rp3.885.965.189,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Balai POM di Banyumas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.885.965.189,00 atau 46.74 % dari anggaran belanja sebesar Rp8.313.169.000,00.

Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp4.421.514.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif adalah 46.74 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

Akun	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Realisasi %
51	Belanja Pegawai	2.103.766.000,00	2.099.093.742,00	99,78
52	Belanja Barang	2.503.303.000,00	1.784.351.447,00	71,28
53	Belanja Modal	3.706.100.000,00	2.520.000,00	0,07
	Jumlah bruto	**8.313.169.000,00**	**3.885.965.189,00**	46,74
	Pengembalian	-		
	Jumlah Netto	8.313.169.000,00	3.885.965.189,00	47

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 secara umum mengalami penurunan sebesar 40,67 % dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan pada Tahun 2025 dikarenakan adanya tugas belajar dan pembayaran Gaji CPNS, PPPK yang belum dilaksanakan karena masih dalam proses kelengkapan administrasi dan pembayaran tunjangan kinerja terpusat.
2. Realisasi belanja barang mengalami penurunan pada Tahun 2025 dikarenakan adanya efisiensi DIPA Tahun 2025
3. Realisasi belanja modal mengalami penurunan pada semester 1 Tahun 2025 dikarenakan adanya efisiensi DIPA Tahun 2025.

Tabel 8

Perincian perbandingan Realisasi Belanja

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
51	Belanja Pegawai	2.099.093.742,00	3.465.036.070,00	(39,42)
52	Belanja Barang	1.784.351.447,00	2.317.868.688,00	(23,02)
53	Belanja Modal	2.520.000,00	766.717.000,00	(99,67)
	Jumlah	**3.885.965.189,00**	**6.549.621.758,00**	(40,67)

Belanja Pegawai Rp2.099.093.742,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai POM di Banyumas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.099.093.742,00 dan Rp3.465.036.070,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 39.42 % disebabkan adanya beberapa pegawai yang adanya tugas belajar dan pembayaran Gaji CPNS, PPPK yang belum dilaksanakan karena masih dalam proses kelengkapan administrasi serta pembayaran tunjangan kinerja yang dikelola oleh eselon I kantor pusat BPOM sehingga berdampak pada realisasi anggaran belanja pegawai.

Tabel 9

Perbandingan Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.333.028.330,00	1.170.598.400,00	1,39
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.027,00	18.493,00	1,91
Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS	105.879.474,00	84.882.950,00	2,47
Belanja Tunj. Anak PNS	29.115.098,00	23.129.114,00	2,59
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.940.000,00	5.400.000,00	17,67
Belanja Tunj. Fungsional PNS	153.255.000,00	134.583.000,00	1,39
Belanja Tunj. PPh PNS	7.836.603,00	6.217.871,00	2,60
Belanja Tunj. Beras PNS	82.196.700,00	68.292.060,00	2,04
Belanja Uang Makan PNS	180.849.000,00	138.608.000,00	3,05
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.655.000,00	9.065.000,00	5,06
Belanja Gaji PPPK	117.269.600,00	78.466.400,00	4,95
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.656,00	1.380,00	2,00
Belanja Tunj. Suami/ Istri PPPK	3.993.800,00	0,00	100,00
Belanja Tunj. Anak PPPK	448.504,00	0,00	100,00
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	9.450.000,00	8.800.000,00	0,74
Belanja Tunj. Beras PPPK	4.200.360,00	1.882.920,00	12,31
Belanja Uang Makan PPPK	22.198.000,00	12.894.000,00	7,22
Belanja Tunjangan Khusus	1.850.000,00	1.611.513.322,00	(9,99)
Belanja Tunjangan Khusus PPPK	0,00	92.275.974,00	(10,00)
Belanja Uang Lembur	14.559.000,00	14.679.000,00	(0,08)
Belanja Uang Lembur PPPK	4.345.590,00	3.729.000,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	**2.099.093.742,00**	**3.465.036.884,00**	(39,42)
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	814,00 -	
Jumlah Belanja	**2.099.093.742,00**	**3.465.036.070,00**	(39,42)

Tabel 10

Perincian Pengembalian Belanja Pegawai

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.919.562.822,00	3.252.308.210,00	(40,98
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	159.411.920,00	194.320.674,00	(17,96
Belanja Lembur	20.119.000,00	18.408.000,00	9,29
Jumlah Belanja Kotor	**2.099.093.742,00**	**3.465.036.884,00**	(39,42
Pengembalian Belanja Pegawai	**0**	**814**	
Jumlah Belanja	**2.099.093.742,00**	**3.465.036.070,00**	**- 39,42**

Per 31 Desember 2025 Tidak terdapat pengembalian belanja pegawai.

Belanja Barang Rp1.784.351.447,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.784.351.447,00 dan Rp2.318.323.688,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 23,02 % disebabkan adanya efisiensi belanja barang/ jasa dan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan obat dan makanan.

Tabel 11

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	176.379.374,00	204.478.539,00	(13,74)
Belanja Barang Non Operasional	148.272.202,00	247.480.205,00	(40,09)
Belanja Barang Persediaan	95.128.938,00	89.186.660,00	6,66
Belanja Jasa	669.666.383,00	684.058.655,00	(2,10)
Belanja Pemeliharaan	27.366.799,00	27.667.280,00	(1,09)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	667.537.751,00	1.065.452.349,00	(37,35)
Jumlah Belanja Kotor	**1.784.351.447,00**	**2.318.323.688,00**	**(23,03)**
Pengembalian Belanja	-	455.000,00	-
Jumlah Belanja	**1.784.351.447,00**	**2.317.868.688,00**	**(23,02)**

Belanja Modal Rp2.520..000,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.520.000,00 dan Rp144.314.000,00. Realisasi belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 98,25 % yang disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Tabel 12
Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.520.000,00	144.314.000,00	(98)
Jumlah Belanja	**2.520.000,00**	**144.314.000,00**	(98,25)
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	**2.520.000,00**	**144.314.000,00**	(98,25)

Belanja Modal Peralatan dan mesin Rp2.520.000,00.

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Balai Besar POM di Banyumas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.520.000,00 dan Rp144.314.000,00. Belanja modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp146.834000,00 atau 94,00 % bila dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan pemblokiran mandiri (selfblocking) dalam rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjusment). Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 13.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.520.000,00	40.216.000,00	6
Jumlah Belanja Kotor	2.520.000,00	40.216.000,00	6
Pengembalian	-	-	6
Jumlah Belanja Kotor	2.520.000,00	40.216.000,00	13

Penjelasan atas belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.520.000,00 sebagai berikut :

Tabel 14.

Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	uraian	Tgl Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai
1	Prasasti	27 Mei 2025	250291303001998	2.520.000,00
	Total			**2.520.000,00**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp46.394.784,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai POM di Banyumas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp46.394.784,00. Dan Rp46.131.985,00.. Aset Lancar merupakan pembayaran yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan

Rp46.394.784,00

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp46.394.784,00. Dan Rp46.131.985,00. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

Perincian Mutasi Persediaan

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2024	**46.131.985,00**
Mutasi Tambah	97.588.560,00
Mutasi Kurang	97.325.761,00
Saldo Per 31 Desember 2026	**46.394.784,00**

Tabel 16.

Perincian Persediaan

untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	17.386.734,00	12.723.875,00
Suku Cadang	1.981.350,00	14.989.530,00
Bahan Baku	27.026.700,00	18.418.580,00
Jumlah	**46.394.784,00**	**46.131.985,00**

Pada periode 31 Desember 2025 seluruh kondisi persediaan dalam kondisi baik dan telah dilakukan Stok Opname Persediaan sesuai BAST Stok Opname Nomor : PL.03.10.24B.12.25.1461 tanggal 31 Desember 2025.

Aset Tetap Rp11.102.021.494,00

C.2. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Balai POM di Banyumas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp11.102.021.494,00 dan Rp11.318.890.031,00 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan opreasional entitas. Aset Tetap pada Balai POM di Banyumas berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp10.424.038.000,00

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.424.038.000,00 dan Rp10.424.038.000,00 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Mutasi Nilai Tanah Per 31 Desember 2025

Saldo Per 31 Desember 2024	**10.424.038.000,00**
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo Per 31 Desember 2026	**46.394.784,00**

Saldo per 1 Januari 2025		**Rp10.424.038.000,00**
Mutasi tambah		**Rp0,00**
Mutasi Kurang		**Rp0,00**
Saldo Per 31 Des 2025		**Rp10.424.038.000,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025		Rp0,00
Nilai Buku per 31 Des 2025		**Rp10.424.038.000,00**

Tidak terdapat mutase aset tanah sampai dengan tanggal pelaporan.

Peralatan dan Mesin Rp1.760.320.125,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp1.760.320.125,00 dan Rp1.733.734.395,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024		**Rp1.733.734.395,00**
Mutasi tambah		**Rp195.368.940,00**
Pembelian	Rp0,00	
Transfer Masuk	Rp43.486.030,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp141.602.410,00	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp10.280.500,00	
Reklasifikasi dari aset tetap lainnya	Rp16.900.300,00	
Mutasi Kurang		**Rp168.783.210,00**
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp168.783.210,00	
Saldo Per 31 Des 2025		**Rp1.760.320.125,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025		Rp1.087.156.631,00
Nilai Buku per 31 Des 2025		**Rp673.163.494,00**

Aset tetap lainnya Rp7.820.000,00

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan peralatan dan mesin berupa :

-Transfer Masuk senilai Rp43.486.030,00

-Reklasifikasi Masuk senilai Rp141.602.410,00

-Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp10.280.500,00-

- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp16.900.300,00

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi pengurangan peralatan dan mesin berupa :

-Penghentiaan Aset Dari Penggunaan senilai Rp.16.900.300,00

C.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam peralatan dan mesin. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp7.820.000,00 dan Rp2.600.000,00.

Tabel 19

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Saldo Per 31 Desember 2024	**2.600.000,00**
Mutasi Tambah	5.220.000,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	**7.820.000,00**

Uraian	Aset Tetap Lainnya		Jumlah	
Saldo per 1 Januari 2025			**Rp**	**2.600.000**
Mutasi Tambah			**Rp**	**5.220.000**
Pembelian	Rp	2.520.000		
Reklasifikasi Masuk dari Persediaa	Rp	2.700.000		
Mutasi Kurang			**Rp**	**-**
Saldo Per 31 Des 2025			**Rp**	**7.820.000**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025			**Rp**	**2.431.250**

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah berupa :

- Pembelian Prasasti Balai POM di Banyumas senilai Rp2.520.000,00 dan Reklasifikasi Masuk dari Persediaan berupa Buku Farmakope Rp2.700.000,-

Tidak terdapat mutasi kurang sampai dengan 31 Desember 2025.

Akumulasi penyusutan Aset Tetap (Rp1.087.156.631,00)

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam peralatan dan mesin. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah (Rp1.087.156.631,00) dan (Rp841.482.364,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Des 2024
Peralatan dan Mesin	(1.087.156.631)	(841.482.364)
Jumlah	**(1.087.156.631)**	**(841.482.364)**

Aset Lainnya Rp0,00

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai POM di Banyumas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Balai POM di Banyumas terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp17.330..775.,00	**C.3.1 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya** Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp17.330.775,00 dan Rp12.172.552,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir T.A. (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakakan untuk diserah terimakan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan awal T.A. 2025 berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir T.A. 2024 yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada T.A. berikutnya. Terkait RPATA pada satuan kerja Balai POM di Banyumas merupakan dana pembayaran Jasa Outsourcing Bulan Desember 2025, sesuai dengan SPK No : PL.02.01.14C.01.25.04 untuk Pengadaan Jasa Outsourching Tgl 2 Januari 2025 dengan rekanan yakni PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
Kewajiban Jangka Pendek Rp46.579.329,00	**C.4 Kewajiban Jangka Pendek** Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Balai POM di Banyumas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp46.579.329,00 dan Rp15.042.744,00
Utang kepada pihak ketiga Rp46.579.329,00	**C.4.1. Utang kepada pihak ketiga** Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp46.579.329,00 dan Rp15.042.744,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus

dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai POM di Banyumas per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Perincian Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah	
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp	26.706.676,00
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp	2.541.878,00
3	Utang pihak ketiga lainnya	Rp	17.330.775,00
Jumlah		Rp	46.579.329,00

Penjelasan terhadap Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp46.579.329,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar sebesar Rp26.706.676,00 merupakan tagihan belanja pegawai yang sampai akhir periode pelaporan belum dibayarkan dan baru dilakukan pembayaran.
2. Belanja Barang yang Masih harus Dibayar sebesar Rp2.541.878,00 merupakan tagihan belanja barang yang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)nya belum terbit sampai dengan periode pelaporan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
1	Tagihan Listrik Bulan Desember 2025	Rp	2.165.252,00
2	Tagihan Air Bulan Desember 2025	Rp	230.480,00
3	Tagihan Telepon Bulan Desember 2025	Rp	146.146,00
Jumlah		Rp	2.541.878,00

3. Utang kepada Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp Rp17.330.775,00 merupakan Pembayaran Outsourcing Bulan Desember 2025 dengan mekanisme RPATA sesuai dengan SPK No : PL.02.01.14C.01.25.04 untuk Pengadaan Jasa Outsourching Tgl 2 Januari 2025 dengan rekanan yakni PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA

Utang yang belum ditagihkan Rp0.,00	**C.4.2. Utang yang belum ditagihkan** Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar namun belum ditagihkan oleh pemberi utang dan harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Yang Belum Ditagihkan yang muncul merupakan nilai kuitansi atau tagihan ke Bendahara dan telah dilakukan pembayaran melalui mekanisme LS
Uang Muka dari KPPN Rp0,00	**C.4.3. Uang Muka dari KPPN** Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dalam bentuk Rupiah Murni (RM) yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
Ekuitas Rp11.122.167.724,00	**C.5. Ekuitas** Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp11.122.167.724,00 dan Rp11.362.151.824,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Selisih Pendapatan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual pendapatan sewa, sisa kewajiban PNBP dan perbedaan pengelompokkan pendapatan yang masuk ke pendapatan kegiatan non operasional lainnya.

Beban Pegawai Rp2.120.311.742,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.120.311.742,00 dan Rp3.456.268.070,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 22

Perincian Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir

Pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.333.028.330,00	1.170.598.400,00	13,88
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.917,00	18.493,00	18,52
Beban Tunj. Suami/ Istri PNS	105.180.014,00	84.882.950,00	23,91
Beban Tunj. Anak PNS	29.115.098,00	23.129.114,00	25,88
Beban Tunj. Struktural PNS	14.940.000,00	5.400.000,00	176,67
Beban Tunj. Fungsional PNS	153.255.000,00	134.583.000,00	13,87
Beban Tunj. Pph PNS	7.836.603,00	6.217.871,00	26,03
Beban Tunj. Beras	82.051.860,00	68.292.060,00	20,15
Beban Uang Makan PNS	202.067.000,00	138.608.000,00	45,78
Beban Tunj. Umum PNS	13.285.000,00	9.065.000,00	46,55
Beban Gaji Pokok PPPK	117.269.600,00	78.466.400,00	49,45
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.656,00	1.380,00	20,00
Beban Tunj. Suami/ Istri PPPK	3.993.800,00	N/A	100,00
Beban Tunj. Anak PPPK	448.504,00	N/A	100,00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	9.450.000,00	8.800.000,00	7,39
Beban Tunj. Beras PPPK	4.200.360,00	1.882.920,00	123,08
Beban Uang Makan PPPK	22.198.000,00	12.894.000,00	72,16
Tunjangan Umum PPPK	1.850.000,00	N/A	100,00
Beban Uang Lembur	14.559.000,00	14.679.000,00	(0,82)
Beban Uang Lembur PPPK	5.560.000,00	3.729.000,00	N/A
Beban Pegawai (Khusus/Kinerja)	N/A	1.611.513.322,00	100,00
Tunjangan Kinerja PPPK	N/A	92.275.974,00	100,00
Jumlah Beban Pegawai	**2.120.311.742,00**	**3.465.036.884,00**	(38,81)

Selisih Beban Pegawai yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan adanya jurnal akrual beban pegawai yang masih harus dibayar, BAST/Spby/SPP belanja pegawai yang belum terbit SP2D dan pengembalian belanja yang berasal dari potongan SPM namun belum terbit SP2D

Beban Persediaan Rp72.868.181,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp72.868.181,00 dan Rp90.058.006,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Perincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Persediaan Konsumsi	40.764.691	70.222.306
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	32.103.490	19.835.700
Jumlah Beban Persediaan	**72.868.181**	**90.058.006**

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.

Beban Barang dan Jasa Rp993.989.645,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Untuk yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp993.989.645,00 dan Rp1.137.376.490,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Jasa Untuk yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Perincian Beban dan Jasa Untuk periode yang berakhir

Pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	95.993.974,00	127.813.539,00	(24,90)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	265.400,00	537.000,00	(50,58)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	79.920.000,00	74.128.000,00	7,81
Beban Barang Operasional Lainnya	200.000,00	2.000.000,00	(90,00)
Beban Bahan	104.144.562,00	144.768.155,00	(28,06)
Beban Honor Output Kegiatan	9.700.000,00	8.000.000,00	21,25
Beban Barang Non Operasional Lainnya	26.592.640,00	60.109.750,00	(55,76)
Beban Peralatan Mesin Ekstrakomptable	7.835.000,00	34.602.300,00	(77,36)
Beban Langganan Listrik	32.516.778,00	44.656.526,00	(27,18)
Beban Langganan Telepon	1.765.571,00	1.022.229,00	72,72
Beban Langganan Air	2.091.412,00	1.904.173,00	9,83
Beban Sewa	371.927.008,00	339.674.000,00	9,50
Beban Jasa Profesi	32.550.000,00	62.700.000,00	(48,09)
Beban Jasa Lainnya	228.487.300,00	235.460.818,00	(2,96)
Jumlah	**993.989.645**	**1.137.376.490**	(12,61)

Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA da LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar. BAST/Spby/SPP belanja barang dan jasa yang belum terbit SP2D.

Beban Pemeliharaan Rp27.366.799,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27.366.799,00 dan Rp31.358.980,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Perincian Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir

Pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.965.000,00	14.536.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin	24.401.799,00	12.859.780,00	100,00
Beban persediaan suku cadang	0,00	3.962.700,00	
Jumlah	**27.366.799,00**	**31.358.980,00**	100,00

Selisih Beban Pemeliharaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat perbedaan pengelompokan sebagian akun beban persediaan yang masuk kategori beban pemeliharaan.

Beban Perjalanan Dinas Rp667.537.751,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp667.537.751,00 dan Rp1.064.997.349,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Perincian Beban Perjalanan Dinas

Untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	467.370.781,00	671.924.655,00	(30,44)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.545.000,00	134.243.000,00	(42,98)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56.230.000,00	47.970.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	67.391.970,00	210.859.694,00	-
Jumlah	**667.537.751,00**	**1.064.997.349,00**	**(37,32)**

Selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat BAST/Spby/SPP Belanja Perjalanan Dinas yang belum terbit SP2D.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp112.973.112,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp189.114.828,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112.648.112,00	188.464.828,00	(40,23)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	325.000,00	650.000,00	(50,00)
Jumlah	**112.973.112,00**	**189.114.828,00**	**(40,26)**

Defisit dari Kegiatan Non Operasioanal Rp1.303.840,00

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.303.840,00 dan Rp793.000,00.

Tabel 28

Perincian Kegiatan Non Operasional

Untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	1.091.200,00	0,00	100,00
Beban pelepasan aset non lancar	212.640,00	793.000,00	-
Jumlah	**1.303.840,00**	**793.000,00**	**64,42**

Merupakan pengembalian belanja dengan perincian sebagai berikut :

- Pengembalian sisa tunjangan struktual senilai Rp740.000,00 sesuai No. NTPN 2EF41488VVNNMMU8M Tgl 8 Januari 2025
- Pengembalian sisa uang makan bulan Desember 2024 senilai Rp351.200,00 sesuai No. NTPN1E9793CIFT5A9TMT Tgl 8 Januari 2025
- Lelang Peralatan dam Mesin kondisi rusak berat, dengan nilai total sejumlah Rp785.000,00 berdasarkan rialah lelang No : 218/09.06/2025-01 Tanggal 25 September 2025 dengan No NTB : 031842017653 dan No NTPN : A7ACD48VV0G5J9NG.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp11.362.151.824,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.362.151.824,00 dan Rp10.767.574.245,00.

Defisit LO Rp4.015.500.970,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.015.500.970,00 dan (Rp5.967.949.723,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak kumulatif perubahan kebijakan Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Deser 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian nilai aset m penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perole

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan ya karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada period Koreksi atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilak ulang aset. Selisih revaluasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 D dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp299.031,00)

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp299.031,00) dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai atau pencatatan saldo awal.

Koreksi Lain-lain Rp0,00

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar Entitas Rp3.886.918.361,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing adalah sebesar Rp3.886.918.361,00 dan Rp6.562.527.302,00. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Badan POM, antar Badan POM, maupun Badan POM dengan BUN.

Tabel 29

Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan Ke Entitas Lain	3.885.965.189,00
Diterima dari Entitas Lain	1.876.200,00
Transfer Masuk	-
Jumlah	**3.887.841.389,00**

Tabel 30

Perincian Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan Ke Entitas Lain	
Realisasi Belanja Pegawai	2.099.093.742
Realisasi Belanja Barang	1.784.351.447
Realisasi Belanja Modal	2.520.000
Jumlah DKEL	**3.885.965.189**
Diterima dari Entitas Lain	
PNBP Lainnya	(1.091.200)
Jumlah DDEL	**(1.091.200)**

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/

Diterima Dari Entitas Lain /Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Balai POM di Banyumas yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp3.885.965.189,00

Sedangkan DDEL sebesar Rp1.091.200,00 merupakan :

- Pengembalian sisa tunjangan struktual senilai Rp740.000,00 sesuai No. NTPN 2EF41488VVNNMMU8M Tgl 8 Januari 2025
- Pengembalian sisa uang makan bulan Desember 2024 senilai Rp351.200,00 sesuai No. NTPN1E9793CIFT5A9TMT Tgl 8 Januari 2025

Transfer Masuk Rp0,00

E.4.2. Transfer masuk

Transfer masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Badan POM RI. Transfer masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 .

Ekuitas Akhir Rp11.233.500.184,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.233.500.184,00 dan Rp11.362.151.824,00.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1.1. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada TA 2025

F.1.2. Rekening Penampungan Akhir (RPATA)

Balai POM di Banyumas Per 31 Desember 2025 terdapat Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) sesuai dengan PMK No.84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.

F.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Banyumas Nomor HK.02.02.14C.12.24.51 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan T.A. 2025, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker 672844 telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Winanto, S.Si., Apt., M.Sc
Pejabat Pembuat Komitmen I : Raden Satriya Pinandhita, SE
Pejabat Pembuat Komitmen II : Edho Nilantha Yudha, SE
Pejabat Penandatangan SPM : Anis Permata Laksari, SE
Bendahara Pengeluaran : Gaung Ranggatama, STP
PPAB : Leny Limasari, A.Md
Staf Pengelola Keuangan : Hanah Nurbaeti, SE

Terdapat pergantian Pengelola Keuangan, yakni adanya pergantian KPA yang telah disesuakan denganS SK terbaru dengan Nomor HK.02.02.24B.04.25.24 tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukkan

Pejabat Pengelola Keuangan T.A. 2025, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker 672844 telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Gidion, S.Si, M.Sc
Pejabat Pembuat Komitmen I : Raden Satriya Pinandhita, SE
Pejabat Pembuat Komitmen II : Edho Nilantha Yudha, SE
Pejabat Penandatangan SPM : Anis Permata Laksari, SE
Bendahara Pengeluaran : Gaung Ranggatama, STP
PPAB : Leny Limasari, A.Md
Staf Pengelola Keuangan : Hanah Nurbaeti, SE

F.2.2. Nomor Pemerintah

Adapun Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satuan kerja Balai POM di Banyumas adalah :

Jenis	Nomor	Nama
No Rekening	9890316728441000	BPG029 BPOM BALAI POM DI KAB. BANYUMAS

F.2.3. NPWP

Adapun nomor wajib pajak yang digunakan dalam kegiatan operasional satuan kerja Balai POM di Banyumas adalah :

Jenis	Nomor	Nama
NPWP	969117811521000	BALAI POM DI BANYUMAS

F.2.4. Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan POM melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Per 31 Desember 2025 tidak terdapat barang bukti yang berada/ dalam penguasaan secara fisik oleh Balai POM Banyumas sebagai berikut .

NO	PROSES	KLASIFIKASI							
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	LAIN-LAIN
1	Proses SPDP/SPDP	-	0	-	-	-	-	-	-
2	Tahap 1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	P-18/P-19	-	-	-	-	-	-	-	-
4	P-21	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SP3	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (pcs)		0	0	0	0	0	0	0	0

F.2.5. Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional selama periode pelaporan

Balai POM di Banyumas dalam kegiatan operasionalnya dengan menyewa Rumah yang berada di Jl. Gunung Singgalang 14, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas berdasarkan SPK PL.02.02.14C.01.25.01 Tgl 02-01-2025 ; untuk periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Besar POM di Semarang terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, Prioritas Nasional 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, dan Prioritas Nasional 04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional II - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya diantaranya melalui pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar prioritas dengan pagu mencapai Rp6.204.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.047.227,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kementerian/ Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Unit Organisasi : 063
Satuan Kerja : Balai POM di Banyumas

Satker	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)			PN
				Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	PCRO (%)	
672844	3165	QIA005	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	6.204.000	3.046.227	49,1	5	Lembaga	5	PN

PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp97.721.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.145.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)			PN
				Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	PCRO (%)	
672844	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	35.205.000	4.530.000	12,87	9	UMKM	1	PN

Prioritas Nasional IV – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, esetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 10 (sepuluh) program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp850.525.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.090.611,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode		Kegiatan	Belanja			Keluaran			
				Anggaran	Realisasi*	%	Target	Realisasi	Satuan	(%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3165. DR										
1	PDD	001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	96.016.000	9.475.953	9,87	1	0	Lembaga	49,98
2	QCD	U06	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB BANYUMAS	104.479.000	66.884.000	64,02	1	0	Perkara	80
3	QDB	002	Desa Pangan Aman	144.525.000	13.023.250	9,01	1	0	Lembaga	39
4	QDB	003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	92.341.000	8.410.000	9,11	1	0	Lembaga	39
5	QDG	001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	35.205.000	4.530.000	12,87	9	1	UMKM	32
6	QIA	001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	32.066.000	9.140.000	28,5	52	26	Produk	50
7	QIA	002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	33.555.000	15.696.881	46,78	123	54	Produk	46,78
8	QIC	001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	74.618.000	14.970.000	20,06	58	26	Lembaga	45
9	QIC	003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	6.204.000	3.046.227	49,1	5	5	Lembaga	100
10	QIC	004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	231.516.000	41.914.300	18,1	218	121	Lembaga	47
Sub Total				850.525.000	187.090.611					

F.2.7. Capaian Output

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertanahan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) Kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, program, dan kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada UAPPA-W di Lingkup Balai POM di Banyumas antara lain sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2025

Kementerian/Lembaga	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
Unit Organisasi	: 063
Satuan Kerja	: Balai POM di Banyumas
Fungsi	: 07
Sub Fungsi	: 07.01
Program	: DR.WA
Balaisi	: Banyumas

No	Kode		Kegiatan	Belanja			Keluaran				
				Anggaran	Realisasi*	%	Target	Realisasi	Satuan	(%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3165. DR											
1	AEA	001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	45.879.000,00	665.000,00	1,45	14	14	kegiatan	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
2	BAH	001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	72.024.000,00	71.991.300,00	99,95	64	64	dokumen	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
3	BDC	001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	72.000.000,00	19.936.000,00	27,69	95	95	Orang	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
4	BKB	001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	199.480.000,00	##########	71,46	1	1	laporan	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
5	BMB	001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	40.217.000,00	10.293.000,00	25,59	22	22	kegiatan	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
6	CAB	001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	27.020.000,00	2.520.000,00	9,33	1	1	Unit	9,33	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
7	CAN	001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	70.000.000,00	-	0	5	5	Unit	0	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
8	CBV	001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	##########	-	0	3	3	Unit	0	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
9	PDD	001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	96.016.000,00	95.955.441,00	99,94	1	1	Lembaga	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
10	QCD	U06	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB BANYUMAS	104.479.000,00	##########	99,88	1	1	Perkara	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
11	QDB	001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	87.993.000,00	16.108.860,00	18,31	2	2	Lembaga	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
12	QDB	002	Desa Pangan Aman	144.525.000,00	29.150.750,00	20,17	1	1	Lembaga	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
13	QDB	003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	92.341.000,00	13.216.500,00	14,31	1	1	Lembaga	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
14	QDG	001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	35.205.000,00	12.999.000,00	36,92	9	9	UMKM	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
15	QIA	001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	32.066.000,00	32.056.780,00	99,97	52	52	Produk	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
16	QIA	002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	33.555.000,00	33.543.784,00	99,97	123	123	Produk	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
17	QIC001	001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	53.818.000,00	53.817.470,00	100	58	58	Lembaga	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
18	QIC003	003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	6.204.000,00	6.203.477,00	99,99	5	5	Lembaga	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
19	QIC004	004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	252.316.000,00	##########	100	218	218	Lembaga	100	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
Sub Total				5.074.218.000	897.660.918						
3165.WA											
20	EBA	956	Layanan BMN	8.000.000,00	100.000,00	1,25	1	1	Layanan	0	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
21	EBA	994	Layanan Perkantoran	##########	##########	92,5	1	1	Layanan	57,89	Realisasi s.d Bulan Desember 2025
Sub Total				3.238.951.000	2.988.574.391						